

B. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	30,81 %	34,85%	30,65%	Adanya peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi pengelolaan barang milik daerah terhadap pendapatan daerah.	Meningkatnya belanja pemerintah dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintahanl	Terwujudnya NTT bangkit, NTT sejahtera
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %			
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtangan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	27,5%	100 %	73,3%			

3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

NO	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						TARGET (%)	REALISASI (%)		
1	15	PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENAGGARA TIMURNOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Input 67.485.541.482	Input 59.750.129.444	90	88,54		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input 279.682.000	Input 111.887.240	90	40.01	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			1. Sub Kegiatan : 01.01						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			Input	30.000.000	18.250.000				
			Output	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
			2. Sub Kegiatan : 01.02						
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
			Input	25.000.000	5.998.600				
		PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA							

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
	TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Output	Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD				
		Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen				
	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUN AN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI TENTANG TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANAAN TEHKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR							
		3. Sub Kegiatan 01.04						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD						
		Input	25.000.000	25.000.000	100%			
		Output	DPA SKPD	DPA SKPD				
		Outcome	1 DPA	1 DPA				
		3. Kegiatan 01.06						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Iktisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Input	50.000.000	46.650.000				
		Output	Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		3. Sub Kegiatan 01.07						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Input	149.682.000	25.900.640				
		Output	Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Perangkat Daerah				
		Outcome	4 Laporan	4 Laporan				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input 44.014.737.000	Input 38.422.133.257	90	87,29		
		4. Sub Kegiatan 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Input	43.786.430.945	38.315.583.087				
		Output	Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				
		Outcome	255 Orang/Bulan	255 Orang/Bulan				
		5. Sub Kegiatan 02.03						
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Input	22.783.200	22.147.000				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Output	Dokumen Pengujian dan Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Pengujian dan Verifikasi Keuangan SKPD				
		Outcome	12 Dokumen	12 Dokumen				
		6. Sub Kegiatan 02.04						
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
		Input	20.000.000	-				
		Output	Dokumen Akuntansi SKPD	Dokumen Akuntansi SKPD				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		7. Sub Kegiatan 02.05						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
		Input	20.000.000	19.513.000				
		Output	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		8. Sub Kegiatan 02.06						
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
		Input	14.997.000	550.000				
		Output	Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Tanggapan Pemeriksaan				
		Outcome	3 Dokumen	3 Dokumen				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		9. Sub Kegiatan 02.07						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Input	140.525.855	64.340.170				
		Output	Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD				
		Outcome	18 Laporan	18 Laporan				
		9. Sub Kegiatan 02.08						
		Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
		Input	10.000.000	-				
		Output	Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
		Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Input 14.969.500	Input 4.918.100	90	32,85	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang d disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
		10. Sub Kegiatan 03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Input	4.857.200	3.255.100				
		Output	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		11. Sub Kegiatan 03.02						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
		Input	112.300	-				
		Output	Ketersediaan Pengamanan BMD SKPD	Ketersediaan Pengamanan BMD SKPD				
		Outcome	12 Dokumen	12 Dokumen				
		11. Sub Kegiatan 03.05						
		Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
		Input	5.000.000	1.663.000				
		Output	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		11. Sub Kegiatan 03.06		-				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
		Input	5.000.000	-				
		Output	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Input 19.556.400	Input 12.556.829	90	64,21	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
		12. Sub Kegiatan 04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
		Input	4.556.500	1.639.000				
		Output	Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		12. Sub Kegiatan 04.07						
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						
		Input	14.999.900	10.917.829				
		Output	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input 135.061.600	Input 92.721.471	90	68,65	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		13. Sub Kegiatan 05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
		Input	75.000.000	49.685.000				
		Output	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		13. Sub Kegiatan 05.08						
		Pemindahan Tugas ASN						
		Input	2.000.000	-				
		Output	Presentase Pemindahan ASN	Presentase Pemindahan ASN				
		Outcome	100%	100%				
		13. Sub Kegiatan 05.09						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		Input	58.061.600	43.036.471				
		Output	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
		Outcome	5 Orang	5 Orang				
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input 4.491.964.739	Input 3.889.595.959	90	86,59		
		14. Sub Kegiatan 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Bangunan Kantor						
		Input	40.061.200	31.541.300				
		Output	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		15. Sub Kegiatan 06.05						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Input	1.096.394.942	965.270.371				
		Output	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
		Outcome	1 Paket	1 Paket				
		16. Sub Kegiatan 06.06						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Input	32.300.000	23.520.000				
		Output	Koran dan Bahan Bacaan	Koran dan Bahan Bacaan				
		Outcome	46 Dokumen	46 Dokumen				
		17. Sub Kegiatan 06.07						
		Penyediaan Bahan/Material						
		Input	1.490.360.549	1.278.367.714				
		Output	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		18. Sub Kegiatan 06.08						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		Input	440.592.048	439.801.028				
		Output	Makan Minum	Makan Minum				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		19. Sub Kegiatan 06.09						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Input	1.392.256.000	1.151.095.546				
		Output	Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat dan 22 Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat dan 22 Kabupaten/Kota				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input 1.327.210.280	Input 1.035.735.527	90	78,04	Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah; Beberapa Belanja Modal yang tidak terealisasi karena selisih Harga pada Standar Harga dan harga di pasaran.	Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
		20. Sub Kegiatan 07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Lapangan						
		Input	926.955.280	856.680.000				
		Output	Mobil Dinas Roda 2 dan Roda Empat	Mobil Dinas Roda 2 dan Roda Empat				
		Outcome	7 Unit	7 Unit				
		21. Sub Kegiatan 07.10						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Input	400.255.000	179.055.527				
		Output	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				
		Outcome	50 Unit	50 Unit				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input 14.878.962.863	Input 13.984.058.047	95	93,99		
		22. Sub Kegiatan 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Input	298.026.864	246.831.348				
		Output	Surat Menyurat Kantor	Surat Menyurat Kantor				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		23. Sub Kegiatan 08.02						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Input	1.960.888.071	1.509.409.869				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Output	Internet, Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		24. Sub Kegiatan 08.04						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Input	12.620.047.928	12.227.816.83 0				
		Output	Honorarium Bendahara, PPTK	Honorarium Bendahara, PPTK				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input 2.323.397.100	Input 2.196.523.01 4	95	94,54		
		25. Sub Kegiatan 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Input	1.687.476.000	1.658.248.265				
		Output	Operasional Kendaraan Dinas	Operasional Kendaraan Dinas				
		Outcome	28 Unit	28 Unit				
		26. Sub Kegiatan 09.06						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Input	140.660.000	118.785.500				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
2	03	Output	Biaya Servis PC, Printer	Biaya Servis PC, Printer				
		Outcome	12 Bulan	12 Bulan				
		27. Sub Kegiatan 09.09						
		Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Input	186.507.000	180.315.753				
		Output	Rehab Gedung Kantor	Rehab Gedung Kantor				
		Outcome	23 Unit	23 Unit				
		28. Sub Kegiatan 09.10						
		Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Input	308.754.100	239.173.496				
		Output	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik				
		Outcome	25 Unit	25 Unit				
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Input 3.008.228.712	Input 1.216.930.374	85	40,45	- Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan	- Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan

NO	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
						TARGET (%)	REALISASI (%)		
								keuangan daerah; - SK Tim Sertifikasi Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan BPN Provinsi NTT belum dapat dilaksanakan terkendala proses penandatanga nan; - Biaya sertifikasi Tanah belum terealisasi Sesuai target karena terkendala kekurangan Personil di BPN Kabupaten/Ko ta dan memprioritask an sertifikasi lahan milik masyarakat	dengan kemampuan keuangan daerah - Membentuk dan mempercepat proses adminsitrasiS K Tim sertifikasi Lahan milik Pemerintah Bersama BPN Provinsi dan kabupaten/K ota,
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Input 3.008.228.712	Input 1.216.930.374	85	40,45	- Pengajuan dalam penatausahaa n keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah; - SK Tim Sertifikasi	- Tetap menjalankan sub kegiatan dengan meminimalisir alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			1. Sub Kegiatan 01.03						
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						
			Input	74.999.900	39.074.000				
			Output	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen			<p>Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan BPN Provinsi NTT belum dapat dilaksanakan terkendala proses penandatanganan;</p> <p>- Biaya sertifikasi Tanah belum terealisasi Sesuai target karena terkendala kekurangan Personil di BPN Kabupaten/Kota dan memprioritaskan sertifikasi lahan milik masyarakat</p>	<p>Membentuk dan mempercepat proses administrasi SK Tim sertifikasi Lahan milik Pemerintah Bersama BPN Provinsi dan kabupaten/Kota,</p>
		2. Sub Kegiatan 01.04						
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						
		Input	49.999.800	-				
		Output	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
		Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen				
		3. Sub Kegiatan 01.05						
		Penatausahaan Barang Milik Daerah						
		Input	99.999.900	49.000.000				
		Output	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		4. Kegiatan 01.06						
		Inventarisasi Barang Milik Daerah						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Input	500.000.000	72.975.080				
		Output	Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah				
		Outcome	1 Laporan	1 Laporan				
		5. Sub Kegiatan 01.07						
		Pengamanan Barang Milik Daerah						
		Input	1.800.000.000	840.545.114				
		Output	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		6. Sub Kegiatan 01.08						
		Penilaian Barang Milik Daerah,						
		Input	99.999.800	37.452.100				
		Output	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Penetapan Status	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Penetapan Status				
		Outcome	2 Laporan	2 Laporan				
		7. Sub Kegiatan 01.09						
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						
		Input	168.000.000	73.411.000				
		Output	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				
		Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen				
		8. Sub Kegiatan 01.10						
		Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan,						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
			Input	150.230.112	83.325.000			
			Output	Dokumen optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
			Outcome	2 Dokumen	2 Dokumen			
		9. Sub Kegiatan 01.11						
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
			Input	24.999.900	3.133.000			
			Output	Laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah per Triwlan	Laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah per Triwlan			
			Outcome	4 Laporan	4 Laporan			
		10. Sub Kegiatan 01.12						
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
			Input	19.999.800	-			
			Output	Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah			
			Outcome	2 Laporan BMD	2 Laporan BMD			
		10. Sub Kegiatan 01.13						
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah						

NO	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
						TARGET (%)	REALISASI (%)		
3	04		Kabuoaten/Kota						
			Input	19.999.500	18.015.080				
			Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
			Outcome	100 Orang	100 Orang				
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Input 14.823.987.743	Input 13.950.064.400	95	95		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Input 14.823.987.743	Input 13.950.064.400	95	95		
			1. Sub Kegiatan 01.01						
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						
			Input	74.971.900	8.860.350				
			Output	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
			Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
			2. Sub Kegiatan 01.03						
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						
			Input	50.000.000	13.281.800				
			Output	Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
			Outcome	5 Laporan	5 Laporan				
			3. Sub Kegiatan 01.08						
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak						

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
					TARGET (%)	REALISASI (%)		
		Daerah						
		Input	50.596.843	-				
		Output	Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan Belum ditindaklanjuti	Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan Belum ditindaklanjuti				
		Outcome	13 Laporan	13 Laporan				
		3. Sub Kegiatan 01.09						
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						
		Input	69.994.500	9.558.000				
		Output	Dokumen Hasil Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				
		Outcome	1 Dokumen	1 Dokumen				
		4. Sub Kegiatan 01.10						
		Penagihan Pajak Daerah						
		Input	13.414.905.000	13.052.952.342				
		Output	Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang pajak	Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang pajak				
		Outcome	12 Dokumen	12 Dokumen				
		5. Sub Kegiatan 01.12						
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
		Input	38.891.300	8.974.732				
		Output	Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				
		Outcome	3 Laporan	3 Laporan				

NO	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp) (Input/Outcome)	REALISASI (Rp) (Input/Outcome)	PERSENTASE		PERMASALA HAN	UPAYA MENGATAS I PERMASAL AHAN
						TARGET (%)	REALISASI (%)		
			6. Sub Kegiatan 01.13						
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
			Input	1.124.628.200	856.437.176				
			Output	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				
			Outcome	12 Laporan	12 Laporan				

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Badan Pendapatan dan Aset Daerah melaksanakan seluruh indikator dalam Perjanjian Kinerja dan semuanya teralokasikan pada Dokumen Anggaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023.

3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

1. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

- Penerapan penagihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat peringatan 1 dan 2 (SP1 dan SP2)
- Menjalin komunikasi dengan kepolisian untuk menerapkan operasi tertib pajak.
- Membuka Akses Layanan Pembayaran Di Luar Kantor Samsat: Samling, Satgas, Samsat Bumdes, Samsat Corner, Samsat On Call dan Pembayaran Lewat Kantor Bank NTT
- Pembayaran Secara Non Tunai Melalui kanal Pembayaran Bank NTT, payment Online /Mesin Edc (QRIS/ATM Logo GPN)
- Melakukan Upaya Penelusuran Obyek Pajak Melalui Kegiatan Door To Door Menggunakan Aplikasi Samsat Door To Door
- Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Yang Ingin Melakukan Pengecekan Pkb Melalui Aplikasi B'sonto Sa
- Pemberian Kebijakan Tax Amnesty
- Pemotongan TPP bagi ASN Lingkup yang terlambat/menunggak Pajak Kendaraan Bermotor
- Saat ini sementara disiapkan pelayanan SAMSAT DIGITAL

2. Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Hasil Kekayaan Daerah Yang diPisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

- Meningkatkan kegiatan penagihan retribusi dan lain-lain PAD yang sah dengan pihak ketiga
- Menyusun regulasi berupa PERDA maupun PERGUB tentang pemanfaatan wilayah konserfasi, pemanfaatan objek retribusi HHBK dan lain-lain.
- Mengoptimalkan penerimaan retribusi pada masing-masing OPD

- Melakukan renegotiasi nilai kontribusi atas sewa aset pemerintah dengan pihak ketiga.
- Mendorong optimalisasi pembayaran deviden oleh BUMD

3. Strategi Pencapaian Target Penerimaan dari Hasil Pemanfaatan Aset Tahun 2023

- Melakukan penagihan secara rutin kepada mitra kerjasama
- Melakukan publikasi atas aset-aset primer/strategis kepada masyarakat dalam rangka kerjasama pemanfaatan (sewa, BGS, KSP)
- Melakukan appraisal/penilaian atas aset-aset primer
- Target sesuai Renstra 2018 sampai dengan 2023 sebanyak 294 sertifikat dengan realisasi sertifikat Tahun Anggaran 2018 target 20 realisasi 30, 2019 target 30 realisasi 30, 2020 target 35 realisasi 9, 2021 target 70 realisasi 14 dan 2022 target 75 realisasi 14, serta Tahun 2023 target 30 realisasi 17.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
a.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan diagnosa mendalam terhadap Retribusi Daerah dan Pola pendekatan yang terus dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan 	Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensi dikembangkan untuk mendukung kapasitas fiskal daerah adalah Pendapatan dari Retribusi Daerah. Beberapa strategi peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur intensifikasi melalui perbaikan kualitas pelayanan public, penggunaan teknologi/sistem pemungutan, peningkatan kualitas pegawai pengelola dan peningkatan pengawasan.	Berdasarkan beberapa penjelasan diharapkan BUMD berkontribusi sesuai dengan tujuan pembentukannya diantaranya mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. BUMD juga diharapkan dapat mencakup Bidang usaha dari berbagai aspek pelayanan dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan sumbangan bagi ekonomi daerah yang keseluruhannya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi yang sehat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari APBD disebut dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Adanya kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain karena investasi 	

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	dipisahkan pola pendekatan terhadap kelembagaannya untuk meningkatkan penerimaannya	<p>pemerintah daerah ada Badan Usaha, baik perusahaan Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan milik swasta. Investasi daerah yang berupa kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 	
b.	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya perluasan tax base perlu dilakukan secara berkelanjutan dan didukung pemanfaatan sistem pendataan dan akuntansi yang memadai sehingga tax base potensial dan dirubah menjadi tax base efektif (rill) 	<p>Perluasan base pajak, atau yang dikenal juga sebagai perluasan dasar pajak, merujuk pada usaha untuk memasukkan lebih banyak sumber pendapatan atau nilai ke dalam dasar pajak. Ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah dari berbagai sumber. Dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor, Perluasan Tax Base yaitu bagaimana pemerintah dapat menjangkau Wajib Pajak Plat Luar yang beroperasi di wilayah NTT yang merupakan Potensi objek baru bagi PAD NTT dengan berbagai kebijakan pemberian keringanan bagi kendaraan yang akan melakukan mutasi masuk ke wilayah NTT, kebijakan pembatasan Kuota BBM bagi kendaraan Plat Luar maupun koordinasi dengan kepolisian terus dibangun dalam rangka menertibkan kendaraan plat luar yang beredar di Wilayah NTT. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pemilik plat luar</p>	<p>Sebagaimana diketahui bersama integrasi Samsat Online dengan Sistem Online Bank NTT merupakan suatu inovasi besar yang diinisiasi Komisi III DPRD NTT yang dimulai dalam rapat Komisi III DPRD NTT bersama Bank NTT dan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (saat ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT) pada tanggal 11 Mei 2016.</p> <p>Terobosan ini disambut baik oleh Dispenda Provinsi NTT dan Bank NTT untuk melakukan integrasi penuh kedua system online ini. Dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pengamatan dan pembahasan teknis, Bank NTT menyatakan akan melakukan integrasi Samsat Online dengan Sistem Online Bank NTT pada modul pembayaran melalui seluruh kanal pembayaran bank</p>

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>agar memutasikan kendaraan ke NTT juga dilakukan agar masyarakat sadar bahwa dampak pembayaran Pajak bagi pembangunan di NTT.</p>	<p>NTT. Hal ini tertuang dalam Surat Direksi Bank NTT kepada Ketua Komisi III DPRD NTT Nomor : 771/DIR-</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya intensifikasi penerimaan pajak daerah dan sumber PAD lainnya hendaknya terus ditingkatkan dan didukung penguatan SDM, sistem insentif serta sarana penunjang yang baik 	<p>a. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan Pengembangan: Berikan pelatihan yaitu BIMTEK PENETAPAN kepada Petugas Penetapan Pajak untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan terbaru, teknik perhitungan penetapan, identifikasi berkas/masalah, dan pengetahuan pajak yang diperlukan. - Memberikan Tindakan tegas atau sanksi Disiplin bagi ASN/ Pegawai yang bekerja tidak sesuai aturan yang berlaku. <p>b. Sistem Insentif yang Efektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insentif Berbasis Kinerja: saat ini insentif Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan kepada Instansi Pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan besaran yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku. Insentif pemungutan diatur dalam Peraturan Gubernur NTT No. 28 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan telah diubah dengan Pergub NTT Nomor 107 tahun 2022 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Gubernur NTT No. 28 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. - Kami juga akan melakukan 	<p>D.IT/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penyampaian Rencana Implementasi Samsat Online Dispenda Provinsi dan PT Bank NTT dengan tembusan kepada Kepala Dispenda Provinsi NTT. Dengan demikian Pemerintah terbuka melakukan Kerjasama juga termasuk integrasi data dengan Bank NTT. Proses integrasi system ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi NTT, Kepolisian Daerah NTT, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang NTT dengan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT pada tanggal 28 Agustus 2018. Implementasi PKS ini adalah mulai diluncurkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui kanal pembayaran Bank NTT berupa ATM, m-banking dan Teller, yang dilakukan oleh Gubernur NTT pada tanggal 20 Desember 2018, puncak perayaan hari ulang tahun Provinsi NTT ke-60 di Lapangan Polda NTT. Dalam perjanjian kerja sama Tim Pembina Samsat dengan Bank NTT telah disepakati bersama bahwa pemerintah Menyediakan data Wajib Pajak yang telah teridentifikasi dengan PKB, Denda PKB, BBNKB, Denda BBNKB, SWDKLLJ, Denda SWDKLLJ, dan IWKBU, yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak melalui sistem yang sudah terkoneksi pada Pihak</p>

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>pengkajian kembali terhadap insentif yang diberikan agar dapat diterapkan sistem insentif yang berorientasi pada kinerja. Insentif dapat diberikan kepada UPT atau pegawai yang berhasil mencapai atau melampaui target penerimaan pajak serta beberapa indikator kinerja lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insentif bagi Wajib Pajak: Pertimbangkan insentif untuk wajib pajak yang taat, seperti potongan pajak atau keringanan pajak sebagai penghargaan atas kepatuhan mereka. Melalui kebijakan Tax Amnesty yang diberikan oleh Pemerintah NTT yaitu dalam Pergub NTT No. 56 Tahun 2023 tentang pembebasan Sanksi Administrasi maka diberikan insentif atau diskon PKB bagi yang taat membayar PKB dengan besaran 2-5% sesuai ketentuan yang berlaku. - Pemantauan dan Evaluasi Insentif: Selalu pantau dan evaluasi efektivitas sistem insentif yang diterapkan. Sesuaikan jika perlu untuk meningkatkan kinerja. <p>c. Sarana Penunjang yang Baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur Teknologi yang Memadai: Kami menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses penerimaan pajak dan Implementasikan sistem pajak yang terintegrasi. - Peralatan dan Fasilitas Pendukung: Dukung dengan peralatan dan fasilitas kantor yang memadai untuk memastikan operasional 	<p>Bank NTT secara realtime online.</p> <p>Sistem Samsat Online telah terintegrasi dengan sistem Bank NTT yang dibuktikan dengan adanya fasilitas pembayaran non tunai/Payment Online melalui kanal bayar bank NTT. Wajib pajak/Masyarakat bisa membayar pajak Kendaraan Bermotor secara nontunai melalui fasilitas yang ada pada bank NTT seperti melalui ATM, SMS Banking, QRIS maupun mesin EDC milik Bank NTT serta melalui Aplikasi B'Sonto Sa yang mengenerate kode bayar yang dapat dibayarkan pada sistem bank NTT .</p> <p>Ditiap akhir hari pelayanan juga dilakukan Rekonsiliasi data /pertukaran data antara tim IT bank NTT dengan Tim IT Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT terhadap pembayaran PKB melalui Payment Online Bank NTT & SIGNAL. Pembenahan system dan Sinkronisasi data terus dilakukan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat</p> <p>Saat ini PKS dimaksud sudah dilakukan perubahan untuk meningkatkan jangkauan Kerjasama melalui transaksi Non Tunai lainnya melalui QRIS Bank NTT dan juga semua ATM yang berlogo Gerbang Pembayaran nasional atau GPN dengan menggunakan mesin EDC yang disiapkan Bank NTT di seluruh Kantor Samsat yang ada di NTT.</p> <p>Evaluasi terus dilakukan dalam pembenahan sistem, dan</p>

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>pelatbab SAMSAT berjalan lancar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses Internet dan Komunikasi: Pastikan ketersediaan akses internet yang stabil dan sarana komunikasi yang baik untuk mendukung Pelayanan SAMSAT. <p>d. Pemanfaatan Teknologi untuk Intensifikasi dan Inovasi yang dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Secara Non Tunai Melalui kanal Pembayaran Bank NTT, payment Online /Mesin Edc (QRIS/ATM Logo GPN) - Melakukan Upaya Penelusuran Obyek Pajak Melalui Kegiatan Door To Door Menggunakan Aplikasi Samsat Door To Door - Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Yang Ingin Melakukan Pengecekan Pkb Melalui Aplikasi B'sonto Sa - Membuka Akses Layanan Pembayaran Di Luar Kantor Samsat: Samling, Satgas, Samsat Bumdes, Samsat Corner, Samsat On Call dan Pembayaran Lewat Kantor Bank NTT - Penerapan penagihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat peringatan 1 dan 2 (SP1 dan SP2) - Menjalin komunikasi dengan kepolisian untuk menerapkan operasi tertib - Pemotongan TPP bagi ASN Lingkup yang terlambat/menunggak Pajak Kendaraan Bermotor - Saat ini sementara disiapkan pelayanan SAMSAT DIGITAL 	<p>perbaikan atas kendala-kendala sistem yang terjadi di lapangan, segera di tindak lanjuti dan direspon cepat langsung oleh Tim IT BPAD NTT serta berbagai inovasi juga dilakukan dalam meningkatkan kinerja SAMSAT ONLINE dan Pelayanan SAMSAT dapat berjalan secara efektif sesuai aturan yang berlaku</p> <p>Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk menjamin implementasinya secara efektif:</p> <p>Evaluasi Keseluruhan Sistem: Teknologi: Tinjau infrastruktur teknologi yang digunakan dalam SAMSAT online. Pastikan bahwa perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan mendukung untuk operasional yang lancar.</p> <p>Keamanan Data: Periksa keamanan data dan privasi informasi. Pastikan bahwa data kendaraan aman dan kebijakan keamanan informasi diikuti dengan benar.</p>

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>e. Kampanye Edukasi dan Sosialisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kampanye Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur melalui Poster di media sosial - Sosialisasi Kebijakan Pajak Baru: Sosialisasikan dengan jelas kepada masyarakat mengenai kebijakan pajak baru atau perubahan yang akan dilakukan. Dengan ditetapkannya UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD maka Pemda perlu melakukan Perda yang merujuk pada UU tersebut dan saat ini Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut telah disusun dan sampai pada tahapan evaluasi. Terhadap perda tersebut ini telah dilakukan Konsultasi Publik pada masyarakat juga serta telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah Tahun 2023 sehingga dapat memberikan informasi bagi stakeholder terkait. <p>f. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja Sama dengan BUMDES dalam pelayanan pembayaran Pajak - Saat ini juga akan dibuka layanan SAMSAT On CALL bagi Instansi Vertikal, Rumah Sakit serta Perbankan dalam 	

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>mendekatkan pelayanan serta optimalisasi penerimaan PAjak Kendaran Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan Pihak Swasta: Jalin kerjasama dengan pihak swasta, seperti bank atau lembaga keuangan, untuk meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan pajak. 	
c.	Perlu dilakukan diagnosa mendalam terhadap penerimaan dari Aset Daerah yang dipisahkan untuk mendapatkan ruang atau peluang, pola pendekatan dan bentuk kelembagaan yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan.	BPAD sebagai perangkat Daerah yang mengelola Aset Daerah yang dipisahkan untuk meningkatkan PAD melakukan optimalisasi Aset antara lain melakukan kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Sewa,KSp dan BGS serta melakukan inventarisasi terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi yang dapat dioptimalkan.	BPAD melakukan penertiban terhadap aset-aset milik Pemprov NTT yang digunakan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

1.4. Tindak Lanjut Kebijakan Strategis Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
a.	Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan MOU dengan Kanwil BPN Provinsi NTT dalam rangka kerjasama percepatan proses sertifikat tanah milik Pemerintah Provinsi NTT yang belum bersertifikat	1.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);	Terselesaikannya percepatan proses sertifikat tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018).</p>	
b.	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi Samsat Online dengan Bank NTT telah dilakukan melalui pembayaran Payment Online sejak tahun 2018 Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu dilakukan perluasan Chanel pembayaran non tunai melalui pembayaran PKB secara non tunai menggunakan Aplikasi B'Sonto Sa maka dalam aplikasi B' Sonto sa perlu dilakukan pengembangan menu 	<p>Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0111</p> <p>- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur dengan PT Bank Pembangunan</p>	<p>- Kondisi saat ini Aplikasi B'Sonto Sa hanya dapat menerbitkan Kode bayar yang selanjutnya dapat dibayarkan hanya melalui Bank NTT saja.</p> <p>- Dalam melakukan perluasan kanal pembayaran PKB agar Bank NTT dapat memfasilitasi dengan menerbitkan <i>Virtual Account</i></p>

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>pembayaran yang tergenerate dengan QRIS dan Virtual Account agar pembayaran tidak hanya melalui Bank NTT saja tapi dapat melalui semua Bank</p>	<p>Daerah Nusa Tenggara Timur tentang penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) melalui seluruh unit kerja dan jaringan elektronik PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur</p> <p>Nomor Pihak kesatu : KS.120.23/373/KSNP/VIII/2018; Nomor Pihak kedua : B/5/VIII/2018 Nomor Pihak Ketiga: P/47/SP/2018 Nomor Pihak keempat : 75/PKS-BNTT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018</p> <p>- Nota Kesepahaman antara Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang eektivitas pelayanan publik pada kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Nomor : BPAD.PI.1/900.965/400/2022; Nomor: 02/01/2022; Nomor : P/03/SP/2022; Nomor :017/MOU/II/2022 tanggal 23 Februari 2022</p>	<p>agar dapat dilakukan pembayaran di semua bank namun hal ini belum dapat dilakukan dikarenakan terkendala pembukaan rekening yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>-Saat ini juga sementara akan di kembangkan inovasi SAMSAT DIGITAL</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Sedang dilakukan Surat Penyampaian kepada Perangkat Daerah untuk melakukan Inventarisasi ulang potensi Obyek Retribusi daerah baik yang sudah ada maupun potensi baru sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. 	<p>Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan perubahannya tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	<p>Regulasi Retribusi Daerah</p>

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	-Pembangunan Sistem mulai dari penyeteroran sampai dengan pelaporan yang terintegrasi antara Perangkat daerah Pemungut retribusi dan Badan Keuangan serta Badan Pendapatan dan Aset Daerah.		Akuntabilitas dalam pencatatan dan pelaporan Retribusi Daerah
	-Melakukan penghitungan, pencatatan Obyek Retribusi Daerah secara terperinci dalam Penganggaran dalam APBD dalam sistem SIPD sehingga mudah dalam Evaluasi atau pembinaan dan pengawasan.		Mudah dalam melakukan Evaluasi dan Pengawasan
	-Untuk Pengembangan Retribusi Daerah perlu melakukan Investasi pada Obyek obyek yang punya potensi yang besar dengan penghitungan secara cermat berapa investasi yang diperlukan dan seberapa besar potensi yang kita dapat dari pengembangan investasi		Peningkatan PAD dari Retribusi Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan potensi PAD dan tindakan-tindakan konkret pada tahun 2023 dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digitalisasi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah 	Dalam pembayaran retribusi selama ini masih secara manual, sehingga dalam pencatatan masih mengalami

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	dicanangkan sistem penyetoran dari objek retribusi secara non tunai.	dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. - Surat Edaran Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Provinsi dan Surat Edaran Mendagri No.910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Kabupaten/Kota. - Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2019 Pasal 222.	kesulitan. Karena BUMD tidak menyampaikan bukti penyetoran devidennya, oleh karena itu dengan adanya pembayaran secara non tunai dapat mengatasi masalah tersebut dan dalam pencatatan di lakukan dengan baik.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Alexon Lumba, SH., M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19670828 199510 1 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Fungsional Umum	